74 TH SDM UNGGUL INDONESIA MAJU

HARIAN PAGI
BiMEKS

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | NOMOR: 5326/TAHUN XIX | HARGA ECERAN: RP 3.000,-

Pelaku Curanmor Nyaris Dihakimi

Aparat saat evakuasi pelaku.

Dompu, BimaEkspres.-

Nekat melakukan aksi pencurian motor disiang bolong , seorang pemuda, Rabu (11/9) asal Dusun Tirta Mengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ND, nyaris tewas dihakimi massa.

Beruntung pelaku lari mengamankan diri ke Polsek Kota. "Untung dia lari mengamankan diri di Kantor Polsek Kota," ujar Samsudin salah seorang warga yang juga ikut mengejar pelaku.

Menurut warga, ND kepergok mencuri motor dan mengejar pelaku. Kapolsek Dompu, IPDA Zuharis, SH mengaku, aksi nekat ND dilakuka di So Tolo Jero Selatan, Desa Kareke, Kecamatan Dompu.

Baca: Nyaris... Hal 6

Kadis PU dan Dinsos Didesak Copot

Kota Bima, BimaEkspres.-

Lantaran dinilai lamban hingga menghambat roda Pemerintahan Kota (Pemkot) Bima, dua kepada dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial didesak dicopot. Desakan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH.

Terhitung sejak satu tahun masa pemerintahan Lutfi dan Feri, dua dinas ini sebut Syamsurih tidak gesit menjalankan beberapa program andalan Wali Kota dan jajarannya. Terlebih yang menjadi visi - misi atau janji politik Lutfer saat Pemilukada 2018 lalu.

"Kadis-kadis ini perlu dirombak lagi. Karena anggaran sudah ada, tapi belum juga merealisasikannya. Selama ini terus kita awasi," tegas Syamsurih kepada wartawan Rabu (11/9) di ruangannya.

Dalam catatan pengawasan dan kontroling dewan, dua dinas ini masuk dalam kategori lamban. Dimana beberapa program seperti halnya pada program 10 ribu

Baca: Desak Copot... Hal 6

Petugas pemadaman saat berusaha menjinakkan api saat kebakaran di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Rabu. *Berita di halaman 6.*

Klaim Wali Kota Bima Soal Realisasi Janji Politik Dipertanyakan

Kota Bima, BimaEkspres.-

Klaim Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE atas terealisasinya visi-misi di tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH sebanyak 80 persen, mendapat ragam respon. Terlebih para legislator yang nota bene sebagai lembaga pengontrol kinerja eksekutif.

Adalah M Tajil Arifin SH, atau yang lebih akrab disapa Dae Andang yang merupakan anggota DPRD Kota Bima. Dae Andang menyebutkan, klaim Wali Kota tersebut merupakan upaya pembohongan publik atau khayalak ramai, terlebih warga Kota Bima.

"Tolak ukurnya dari mana? Realisasi itu dari mana? Tolonglah, jangan bohongi publik gini dong," ujarnya dengan nada heran kepada wartawan Rabu (11/9).

Dicontohkan Duta PDI Perjuangan itu, program pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin yang disebut-sebut telah terealisasi, sebutnya hingga kini tidak ada sama sekali. Karena hingga saat ini dari pandangan Andang, audit pembatasan belum kunjung dilakukan sehingga anggaran yang

Baca: Dipertanyakan... Hal 4

Ada Banyak Pelanggaran di Kawasan Ama Hami?

Rapat Pansus Ama Hami DPRD Kota Bima.

Kota Bima, BimaEkspres.-

Pansus DPRD Kota Bima soal penimbunan laut Ama Hami mengungkap berbagai pelanggaran dilakukan Pemkot Bima selama ini atas pemanfaatan kawasan tesebut. Mulai dari menyerobot kewenangan pemanfaat laut, sampai soal tidak dilaksanakannya Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan. Selain itu, tidak miliki RTDRK, penimbunan laut dan pembangunan ruko tidak kantongi ijin reklamasi.

Hal itu terbukti setelah Pansus dewan memanggil sejumlah pihak untuk mengungkap terjadinya dugaan mafia atas pemanfaatan dan kepemilikan laut Ama Hami, Rabu (11/9).

Pada agenda rapat Pansus Rabu, dihadiri Dinas PUPR, diwakili Kabid Tata Ruang, Ririn Kurniawati, Sekretaris Bappeda dan Litbang, Tafsir Dinas Perkim diwakili Bidang Pertanahan dan Pemukiman, Pujawan, Dinas Perijinan Terpadu, Lurah, serta Camat.

Dari pemilik lahan hanya dihadiri pemilik Ruko di bagian timur Pasar Ama Hami,

Baca: Pelanggaran... Hal 7

CATATAN REDAKSI

Memacu SDM NTB

PEMERINTAH *Provinsi NTB, saat ini gencar untuk mengirimkan sumber daya manusianya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kebijakan ini tentu sebagai lompatan besar. Kisah Kaisar Jepang pascaledakan Bom Hirosiba, yang menanyakan guru yang tersisa menjadi bukti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan.*

Namun, baru-baru ini, ada temuan yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat, terkait dugaan penyimpangan dalam prosedur program beasiswa ke Korea Selatan (Korsel). Kesimpulan itu berdasarkan tindaklanjut dari keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengiriman pelajar ke Korsel.

Meski ada temuan itu,bukan berarti semua harus terhenti. Namun, lebih memilih kehati-hatian, agar SDM NTB lebih Gemilang.

Bahwa sesuai amanat konstitusi tugas mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Amanat ini tertuang mulai dari UUD RI 1945, UU Sistim Pendidikan Nasional, hingga UU Pemerintah Daerah.

Terkait pemerintah daerah, karena itulah dalam melaksanakan tugas memberikan pendidikan kepada warga masyarakat pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk berkerjasama dengan daerah lain, bahkan dengan negara lain, atau lembaga di luar negeri.

Sesuai ketentuan bentuk-bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri ataupun lembaga luar negeri harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 (mulai Pasal 363 hingga Pasal 367 dan dipertegas dalam turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mulai Pasal 23 hingga Pasal 39) antara lain mewajibkan kegiatan perjanjian kerjasama dengan lembaga luar negeri harus dimulai dengan adanya persetujuan DPRD yang diikuti adanya naskah kerjasama yang diketahui pemerintah pusat melalui kementerian terkait yang akan memverifikasi dan memberikan pertimbangan tertulis kepada pemerintah daerah hingga pada akhirnya menyetujui menjadi sebuah materi kerjasama.

Provinsi NTB telah memulai proses sesuai mekanisme yang diatur peraturan dan perundang-undangan tersebut. Setelah penandatanganan LoI antara Gubernur NTB dan President of Chodang University, Gubernur NTB pada tanggal 19 Februari 2019 mengirimkan Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama ini ke DPRD NTB. Kemudian pada tanggal 22 April 2019 Sekretaris Daerah Pemprov NTB, mengirimkan Permohonan Persetujuan Kerjasama ke Mendagri cq Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri. Permohonan ini dilegkapi dengan lembar Rencana Kerjasama. Namun demikian sampai pada saat 18 calon mahasiswa diberangkatkan pada Maret 2019, proses perolehan persetujuan pemerintah terhadap permohonan Kerjasama belum selesai, yang berarti belum terbitnya Perjanjian Kerjasama.

Dalam catatan Ombudsman, rencana Provinsi NTB yang membangun kerjasama dengan University of Chodang, Korea Selatan tahun 2019 ini harus disambut positif. Rencana ini adalah rencana mulia, sangat baik, dan patut didukung sepenuhnya oleh setiap pihak. Karena itulah berbagai dinamika, opini dan kekisruhan yang terjadi di ruang publik harus ditemukan jalan keluar penyelesaiannya. (*)

Penimbunan Ama Hami Tak Kantongi Ijin Reklamasi

Kota Bima, BimaEkspres.-

Terungkap belakangan penimbunan disejumlah kawasan Ama Hami tak pernah kantongi ijin reklamasi. Itu setelah pemilik bangunan ruko tak bisa tunjukan bukti otentik didepan Pansus, Rabu (11/9).

Selain tidak pernah kantongi ijin reklamasi ternyata satu pun juga tak pernah kantongi dokumen lingkungan hidup UKL dan UPL. Pun soal ijin usaha perdagangan di kawasan itu tak ada kantongi ijin resmi dari Pemkot Bima, itu berdasarkan Keterangan Dinas Perijinan Terpadu hanya satu orang punya ijin usaha perdagangan di kawasan Ama Hami diterbitkan.

Selah satunya penimbunan di lahan pembangunan Ruko Grup pengusaha dibagian timur pasar Raya Ama Hami. Hal itu diakui H Zakaria Cs salah satu pemilik modal dan usaha di depan Pansus dewan.

Pengakuan itu muncul setelah ketua Pansus memeriksa dokumen diserahkannya. Dari hasil penelitian dilakukan hanya memiliki IMB saja. Dan ini kemudian menjadi atensi pansus dewan atas kelalaian Pemkot Bima selama ini.

H Armansyah

Namun H Zakaria membantah tahu soal ijin reklamasi. Alasannya saat membeli lahan dan Ruko tidak pernah tahu kalau lahan itu dulu tidak miliki ijin reklamasi.

"Saya tak tahu pak, kan kita patungan bangun ruko itu, yang punya lahan atas nama Purna Wijaya ," elaknya.

Diakuinya awalnya lahan itu milik Purna Wijaya yang kemudian dipecahkan menjadi 36 blok. Mengenai dokumen reklamasi apalagi UKL dan UPL dirinya tidak paham.

Ketua Pansus Laut Ama Hami, H Armansyah saat rapat Pansus mengatakan bahwa sesuai Perda dan aturan setiap aktivitas penimbunan kawasan laut wajib mengantongi ijin reklamasi dan dokumen lingkungan.

Itu harus dipenuhi bila hendak lakukan reklamasi, sementara sekarang diketahui ternyata penimbunan dilakukan pengusaha membangun Ruko di bagian timur Pasar Ama Hami ternyata tak memiliki dokumen dimaksud.Ini, kata dia, bisa berimplikasi pidana.

"Saya berharap pada Haji Zakaria untuk bisa berikan dokumen ijin reklamasi, kalau tidak ada ada, silakan tanyakan ke penjual lahan, kalau memang tak ada ijin akan pemerintah bisa rubuhkan bangunan bapak," tegas Armansyah.

Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, bisa dipidana, bukan lagi sanksi administrasi. Siapapun melanggar Perda tata ruang bisa kena sanksi pidana.

"Maaf saya hanya bantu berikan informasi saja, silakan komunikasi ke pemilik lahan," saran duta PKS itu. **(BE06)**

Pertandingan "Lape" Antar Klub di Rasabou Jaga Bakat Pemuda

Bima, BimaEkspres.-

Pertandingan "Lape" antarklub se-Desa Rasabou untuk mengembangkan bakat pemuda dalam hal olahraga. Kegiatan yang berakhir Selasa (10/9) malam itu disertai penyerahan hadiah.

Ketua Panitia, Azimat Haryadi, SH, menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksankan selama 13 hari. Yakni mulai Kamis (29/8) dan ditutup Selasa (10/9). "Sistem yang digunakan yaitu sistem gugur," ujar Abon sapaannya.

Lanjutnya, keluar sebagai juara pertama pada pertandingan tersebut yakni Yusuf Jamaludin cs, kemudian juara ke dua Guntur cs. "Raih juara yakni Sufi cs dan keluar sebagai juara empat yakni Feby cs," ucapnya.

Jumlah klub yang daftar sebanyak sebanyak 42 club dengan total 84 orang, dalam pertandingan ini, jelas Abon, setiap klub mengeluarkan biaya pendaftaran 10 ribu rupiah. "Alhamdulillah para pemain tidak melihat besar kecil jumlah hadiah. Karena sebelumnya telah sepakat untuk bermain sportivitas," ungkapnya.

Salah satu pemain, Marjuki, mengungkapkan, kegiatan ini perlu didukung oleh pemerintah desa karena tujuan utama untuk mengembangkan potensi pemuda sekaligus bisa meningkatkan jiwa olahraga bagi pemuda sendiri.

"Semoga ada andil pemerintah desa untuk membantu kegiatan seperti ini. Kalau boleh dilaksanakan secara rutin," tutupnya. **(BE07)**

HARIAN PAGI BiMEKS

Penerbit: PT Media Anzam Lestari
Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: C-07476 HT.01.01.TH.2006
TERBIT PERDANA 19 JUNI 2000
Pendiri/Pembina: Khairudin M. Ali

Pemimpin Umum: Sofiyan Asy'ari. **Pemimpin Perusahaan/Keuangan:** Nurdinah. **Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Redaktur Pelaksana:** Sofiyan Asy'ari. **Kabag Pemasaran:** Sumriyadin. **Kabag Umum/Produksi dan Iklan: - , Pengembangan Group:** H. M Nasir Ali. **Staf Redaksi:** Purwandi, HM. Nasir Ali, Junaidin, Hermansyah, Dedy Darmawan, Muhammad Khardi, Ikra Hardiansyah. **Perwakilan Mataram:** Purwandi (081 933 143553), **Perwakilan Dompu:** Junaidin. **Pracetak:** Yuman **Percetakan:** Farid, M. Nur, Manda. **Penanggungjawab Group: Bima FM/Bima TV:** Khairun Muhammad **Bimakini.com:** Sofiyan Asy'ari, **Kantor Pusat/Redaksi/Pemasaran/Iklan:** Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima, Telp. (0374) 646840. **Perwakilan Mataram: Purwandi,** Jl. Catur Warga 36 Kampung Jawa Selatan Mataram, Lombok Tlp: 081 933143 553. **Perwakilan Dompu: Junaidin**, Jl. Diponegoro, Rasanggaro, Matua, Dompu (0373) 21768. 082 340 033 322 **Tarif Iklan:** Berwarna (FC) Umum Rp25.000/ milimeter/kolom, Keluarga Rp20.000/milimeter/kolom. Spot Hitam Putih (BW) Umum Rp. 10.000/milimeter/kolom, keluarga Rp. 7.000 milimeter/kolom.Iklan Mini Rp20.000/baris/hari, maksimum 10 baris. Tarif iklan belum termasuk PPn 10 persen. **Harga Langganan** Rp.65.000 per bulan (Luar Kota Rp70.000), bayar di muka. Dicetak oleh Percetakan **BIMEKS** Jl. Gajah Mada 46 BTN Penatoi Kota Bima. (isi di luar tanggungjawab percetakan). Surat-surat dan artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Artikel diketik spasi rangkap dan belum pernah dimuat boleh media lain mana pun. Bisa juga dikirim ke e-mail redaksibmeks@yahoo.co.id.
) Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Harian Pagi BimaEkspres dilengkapi dengan KARTU PERS dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun.

HARIAN PAGI BiMEKS

Pelaku Belum Ditangkap, Warga Kembali Blokade Jalan

Bima, BimaEkspres.-

Keluarga korban perkosaan dan warga Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, kembali menutup jalan di Desa setempat, Rabu (11/9).

Aksi ini dilakukan karena ketidakpuasan terhadap kinerja polisi yang dinilai lamban menangkap pelaku pemerkosaan terhadap salah satu remaja Desa Simpasai.

Keluarga korban pemerkosaan dan sejumlah warga menutup jalan tepatnya di jembatan Desa Simpasai, Kecamatan Monta. Pihak keluarga korban menuntut pelaku ditangkap. Peristiwa itu terjadi di Dusun Sarae Bura, Desa Laju, Kecamatan Langgudu.

"Keluarga korban menuntut supaya pelaku pemerkosaan segera ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Kapolsek Monta, IPTU Takim.

Kapolsek dan jajarannya yang tiba di TKP langsung negosiasi dengan pihak keluarga korban. Meski massa tidak bersedia membuka, namun polisi tetap memaksa.

"Saya meminta kepada keluarga korban supaya membuka kembali jalan, karena dapat menghalangi dan mengganggu arus lalulintas kendaraan yang melintas," ujarnya.

Taklim meminta kebijaksanaan dan kesabarannya keluarga dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Sebab pihak kepolisian sedang berusaha dan berupaya melakukan pencarian dan penangkapan pelaku.

"Saya mengharapkan agar keluarga korban jangan kuatir, karena polisi tidak akan lepas tangan terkait kasus tersebut," katanya.

Bahkan untuk mengusut tuntas kasus itu, Satreskrim Polres Bima Kota dan Jajaran Polsek Langgudu sudah melakukan pertemuan.

"Penyidik berjanji akan bertindak serius dalam melakukan upaya pencarian dan penangkapan pelaku," ujarnya.

Setelah mendengar penjelasan Kapolsek, keluarga korban dan masyarakat langsung membuka kembali jalan yang sempat ditutup beberapa jam tersebut. **(BE05)**

Blokade jalan yang dilakukan oleh warga menuntut pelaku perkosaan ditangkap.

Dua Bakal Calon Kades Donggobolo Tersingkir

Arifin, S. Pd

Bima, BimaEkspres.-

Panitia Pilkades Kepala Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menetapkan dua nama bakal Cakades tidak yang memenuhi perengkingan atau tidak lolos seleksi tambahan. Kedua nama yang tidak ditetapkan itu adalah Maradona dan Hj. Sumarni, sementara lima lainnya memenuhi syarat.

Perhitungan nilai seleksi tambahan bakal calon kepala Desa digelar di aula Kantor Desa setempat Selasa (10/9), dihadiri Kepala Desa dan staf, Ketua BPD dan anggota, bakal calon Kepala Desa dan TNI Polri.

"Hari ini kami melakukan perhitungan nilai seleksi tambahan bakal calon kepala Desa, dari 7 nama bakal calon, kami putuskan Maradona dan Hj. Sumarni tidak lulus," jelas Ketua Panitia Pilkades Desa Donggobolo, Arifin, S. Pd, usai rapat.

Keputusan ini berdasarkan surat keputusan panitia yang tertuang dalam berita acara nomor 033/PAN-PILKADES/Db/IX/2019, karena Bakal calon lebih dari 5 orang, maka akan dilakukan perengkingan.

"Berdasarkan peraturan Permendagri dan Perda, apabila balon lebih dari lima orang, maka akan dilakukan tahapan perengkingan, dalam perengkingan ini, dua nama tidak memenuhi tiga indikator penilaian," jelasnya.

Kata dia, tujuh nama yang mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa itu adalah Jufrin, dari tiga indikator penilaian pengalaman kerja, pendidikan dan usia, nilai yang terkumpulkan menembus angka 84, sementara Tolhab S. Sos nilainya 89, Muhammad Ali nilainya 84, Drs. Azis mendapatkan nilai 89, Maradona hanya 68, Junaidin 84 dan Hj. Sumarni nilainya 81.

"Tolhab S. Sos dan Drs. Azis mendapat ranking 1, Jufrin, Muhammad Ali dan Juniadin mendapat ranking 2, sementara Hj. Sumarni mendapat ranking 6 dan Maradona mendapat ranking 7, dua nama yang mendapatkan perengkingan 6 dan 7 dinyatakan tidak lolos," ujarnya.

Kata dia, perengkingan ini berdasarkan ketentuan berlaku dari Pemerintah tingkat atas, indikator pengalaman kerja diambil bobot nilai 30 persen, indikator pendidikan bobot 40 persen dan usia diambil 30 persen.

"Kami telah bekerja maksimal dan sesuai mekanisme serta prosedur berlaku untuk memutuskan lima nama yang lolos menjadi calon Kepala Desa dan mengelimunasi dua orang pada yang tidak lolos," tegasnya. **(BE05)**

HARIAN PAGI BiMEKS

Akademisi Ingatkan Putusan Pansus Ama Hami untuk Kepentingan Rakyat

Kota Bima, BimaEkspres.-

Ketua STISIP Mbojo – Bima, Drs Mukhlis Ishaka, MAP mengingatkan Pansus Ama Hami untuk bisa mengambil keputusan yang benar dan merujuk pada Perundang-undangan. Apalagi, melihat riwayat kawasan itu faktanya milik negara yang dikuasai secara personal.

Mukhlis menyampaikan, Pansus Amahami dalam memutuskan hasil kerja nanti hendaknya memperhatikan apa menjadi kepentingan umum. Bukan kepentingan oknum-oknum yang menguasai kawasan Ama Hami. Sebab, semua mengetahui jika itu adalah kawasan laut, bukan milik pribadi yang dikuasai seperti saat ini.

Drs Mukhlis Ishaka, MAP

"Dari riwayat kawasan tersebut adalah tanah milik negara dan sangat urgen untuk kepentingan umum, hendaknya oknum-oknum telah menguasainya dengan adanya penerbitan sertifikat, berbesar hati untuk bisa mengembalikan hak penguasaannya kepada negara," tegasnya.

Yang paling penting juga kata Mukhlis, Pansus Ama Hami dalam mengambil putusan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana hal ini tidak diperhatikan, maka akan membawa konsekuensi dan akan menjadi polemik berlarut-larut kedepannya.

"Harus ada kejelasan dari sikap Pansus sekarang. Keputusannya harus menegaskan tentang keberadaan aturan dan UU," katanya.

Tambah Muhlis, sengketa kawasan Amahami memang beberapa tahun terakhir menyita perhatian pemerintah, agar bisa segera diselesaikan.

Pansus pun telah bekerja dengan baik, maka hasil yang diputuskan pun harus benar benar berpedoman pada regulasi.

"Ya kalau berpatokan pada UU, kawasan itu tidak boleh dikuasai secara pribadi, harus dikembalikan ke negara," terangnya.

Terhadap putusan tersebut pun tambah Mukhlis, Pemerintah Kota Bima juga harus menjalankannya dengan baik.

Jangan lagi ada ruang - ruang yang disiapkan untuk terjadinya sesuatu yang bersifat transaksional. Sehingga kawasan itu benar-benar dikembalikan kepada negara, untuk dijadikan kawasan kepentingan umum. **(BE06)**

Ponpes Harus Lahirkan Pemimpin Bangsa Masa Depan

Lombok Tengah, BimaEkspres.-

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menghadiri pengajian Asyura bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, di Pondok Pesantren Darul Muhibbin NW Misfalah Praya, Selasa (10/9) lalu.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan peletakan batu pertama asrama putri dan wisuda dauroh tahfidz Al-Quran ke V sekaligus dauroh kitab metode Al-Miftahlil'ulum ke I.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur mengungkapkan pentingnya peran dan kontribusi pondok pesantren dalam hal pendidikan bagi anak-anak NTB. Ia berharap lulusan pondok pesantren dapat terus mengukir prestasi dan menjadi pemimpin di masa depan.

"Pondok pesantren harus bisa memberikan energi positif di sekelilingnya, dari akhlak santri-santriwatinya, dari lingkungannya, dari kegiatan-kegiatannya, semuanya harus bisa menjadi contoh bagi sekitarnya," tutur Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan. Ia juga berpesan kepada pengurus Ponpes agar tetap mampu meningkatkan kualitas didikan kepada para santrinya.

"Harapannya, santri-santriwati kita disini berprestasi, dan setelah disini bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi," harapnya.

Terakhir, Hj. Rohmi berharap proses pembangunan asrama putri dapat berjalan dengan lancar.

Ia menambahkan agar kedepannya, setiap pondok pesantren di NTB dapat menerapkan program *Zero Waste*. **(BE04)**

Pemdes Rade Sikapi Kelangkaan Air Bersih

Bima, BimaEkspres.-

Pemerintah Desa (Pemdes) Rade, Kecamatan Madapangga, menyikapi kelangkaan air bersih yang melanda warga. Kondisi tersebut sudah menjadi langganan warga di musim kemarau seperti ini.

Penjabat Kepala Desa Rade, Syafruddin S Sos menyampaikan bahwa persoalan krisis air bersih di desa ini menjadi langganan setiap tahun di musim kemarau. Bahkan persoalan itu Pemerintah desa bersama generasi muda setempat terus berupaya mencarikan solusinya.

Namun hingga ini belum juga terselesaikan. Dengan kondisi tersebut memasuki musim kemarau panjang pemerintah Desa Rade sudah lebih awal berupaya mengkomunikasikan dengan beberapa dinas mengajukan proposal permohonan bantuan sumur bor artesis untuk beberapa wilayah yg mengalami krisis air bersih desa setempat.

"Dua proposal sudah kita serahkan langsung ke Bupati melalui dinas Perkim Kab Bima dan ke BPBD Kabupaten Bima. Serta beberapa surat permohonan bantuan air bersih ke beberapa dinas yang berwenang," ujarnya, Rabu (11/9).

Diakuinya, tahun sebelumnya pernah ada program bor dalam dari BPBD Propinsi NTB yang terpasang di halaman Yayasan AL Falah Rade. Kemudian disusul dengan program pipanisasi dari Dinas Perkim Kabupaten Bima. Karena debit air tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan mesin pompa air yg kapasitasnya terlalu kecil. Menyebabkan program tersebut tidak bisa di manfaatkan secara maksimal.

"Bantuan tersebut merupakan wujud dari kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan pemuda sebagai upaya menyelesaikan krisis air bersih. Sehingga kami kembali menyikapi persoalan ini dengan mengajukan proposal tersebut," tegasnya.

Kata dia, dalam pengajuan proposal tersebut mendapat respon yg positif dari Dinas Perkim melalui Kabidnya. Dan mereka berjanji akan mempriotitaskan persoalan air bersih di Rade ini untuk Tahun 2020 mendatang.

"Persoalan di Rade ini menjadi atensi mereka di Tahun 2020 mendatang. Sedangkan di Tahun 2019 ini mereka fokus menyelesaikan persoalan yang sama di Kecamatan Donggo," ungkap Syafruddin.

Ditanya mengenai penggunaan dana desa Tahun 2019, Sekretaris Desa, Amiruddin SPd menyampaikan bahwa proses penyusunan anggaran tersebut sudah melalui tahapan. Yakni melalui proses Musrembangdus, pada proses itu secara bersamaan sedang berlangsung pelaksanaan program pipanisasi oleh Dinas Perkim dan Bor dalam yang berlokasi di halaman Al-Falah Desa Rade. Sehingga dalam proses Musrembangdus tidak muncul usulan untuk kebutuhan air bersih tersebut.

Karena pada prinsipnya penyusunan program desa sifatnya dari bawah ke atas (*buttom up*). Maka saat itu, tim pun menyusun program 2019 berdasarkan usulan yang terjaring dalam forum Musrembangdus. Kemudian Proses Musrembangdus bersamaan dengan adanya pelaksanaan survey lokasi bor sumur artesis oleh tim BWS Propinsi NTB atas proposal permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Pemuda Tahun 2017 lalu.

Maka untuk menghindari adanya benturan program yang sama antara Pemerintah desa dengan BWS. Sehingga menjadi pertimbangan tidak di usulkanya program air bersih lewat Musrembangdus. "Kalau program yang diharapkan tidak benar-benar bisa dilaksanakan BWS dan Pemerintah daerah. Maka kami Pemerintah Desa Rade akan prioritaskan program air bersih melalui APBDes perubahan 2020 mendatang. Jikapun itu mendapat persetujuan dan dukungan pemuda dan masyarakat setempat," pungkasnya. **(BE07)**

Dipertanyakan... dari hal.1

sudah di-*plotting* untuk masjid dalam APBD tidak bisa digunakan sama sekali.

"Itu baru contoh pertama ya. Lalu realisasi mana yang dimaksud Wali Kota dalam pernyataannya itu? Saudara wali kota jangan bohongi publik," sentilnya dengan nada meninggi.

Selain soal masjid, Andang juga menyebut anggaran Rp 12,5 miliar untuk pembukaan 10 ribu lapangan pekerjaan, juga katanya belum terealisasi. Andang mengungkap, anggaran tersebut hanya Rp 7 miliar saja.

"Termasuk soal BPJS yang mengcover ribuan warga Kota Bima itu tidak jelas. Sejauh ini, tidak pernah ada angka berapa yang telah didistribusikan," tepisnya.

Terlebih dibeberkannya, ia sudah menerima informasi adanya warga penerima BPJS dari pemerintah yang hingga kini tidak bisa menggunakannya karena terhitung tunggakan di BPJS.

"Sekali lagi saya pertanyakan, bagaimana yang terealisasi delapan puluh lima persen itu? Belum honorer sukarela yang dijanjikan satu juta, belum lagi soal pemberian *handphone* dan termasuk pembebasan lahan Pelindo," ulasnya dengan heran.

Dia mengharapkan agar Wali Kota lebih baik mengungkap hal-hal yang realistis saja.

Jika memang tidak ada, maka hal tersebut akan menjadi evaluasi bersama baik eksekutif maupun lembaga legislatif seperti dirinya.

Berbanding terbalik dengan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH yang ditemui secara terpisah, Rabu (11/9) di ruangannya.

Syamsurih menyebutkan, jika klaim yang disampaikan Wali Kota saat pembukaan MTQ akhir pekan lalu tersebut, memang berdasarkan apa yang sudah tercantum dalam APBD Murni tahun 2019.

"Kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan angka 80 persen itu. Bahkan lebih kok, jika melihat semua visi misi itu sudah tertuang dalam anggaran daerah," ucapnya.

Dia mencontohkan mulai program BPJS untuk warga miskin, pembangunan masjid Al-Muwahidin, 10 ribu wirausaha baru, pemberian insentif dan lainnya.

"Sudah semua dan sudah dianggarkan dalam APBD," tuturnya.

Sementara soal realisasi, menurut Syamsurih hal tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada Wali Kota saja, melainkan juga kepada dinas teknis.

Untuk itu, Syamsurih meminta wali kota segera mengevaluasi kinerja kepala OPD yang tidak mampu menyerap anggaran.

"Jangan salahkan wali kota soal realisasi. Dinas tekhnis harus digenjot. Jika tidak mampu, segera mutasi diganti dengan yang mampu dan berkinerja," tutup Syamsurih. **(BE09)**

PROFIT HARIAN BARU

Mau punya penghasilan tetap dan dibayar perhari (maaf bukan MLM)

Hub. 083878927577, 08122771434

WWW.BBCVANTAGE.COM

Nunggak, PLN Segel Listrik Kantor Camat Mpunda

Kota Bima, BimaEkspres.-

Lantaran tidak membayar listrik selama dua bulan lamanya, arus listrik di kantor Kecamatan Mpunda, Kota Bima akhirnya disegel PLN Cabang Bima, Rabu (11/09) pagi kemarin.

Praktis akibat dimatikan secara mendadak arus listrik ini, pelayanan dan pekerjaan di kantor setempat terhambat dan lumpuh. Sejumlah ruangan yang membutuhkan arus listrik pun gelap gulita.

Sekretaris Camat Mpunda Kota Bima M. Rifaid mengaku disegelnya listrik tersebut dikarenakan pihaknya tidak bayar tagihan pada bulan Agustus dan September.

"Sesuai tagihan PLN, jumlah tunggakan senilai Rp 1.649.333. Dan kita belum membayar," tukasnya kepada wartawan Rabu (11/9) kemarin dengan nada datar.

Lantaran aksi penyegelan ini lanjut Rifaid, listrik diputus sementara waktu dan listrik akan disambung kembali apabila tunggakan dilunasi.

Meteran yang sempat disegel.

"Jika dalam jangka waktu 60 hari tidak dilunasi, maka instalasi listrik akan dibongkar," ungkapnya.

Faktor keterlambatan pembayaran ini diakui Rifaid lantarannya adanya selisih paham antara Camat dan Bendahara tentang penatausahaan keuangan sehingga kas kantor kosong.

"Tapi kita akan berkoordinasi dengan bendahara untuk mengusahakan pembayaran tunggakan tersebut," pungkasnya.

Rabu siang, segel meteran listrik Kantor Camat Mpunda akhirnya dibuka kembali. Hal itu setelah ada koordinasi dengan pihak PLN. **(BE09)**

Wagub Paparkan Pariwsata NTB

Jakarta, BimaEkspres.-

Sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alamnya yang indah, terbentang dari ujung Ampenan sampai ujung Sape menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang menikmatinya. Berbagai *event* berskala nasional maupun internasional kerap kali dilaksanakan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pariwisata juga telah memasukkan Mandalika Lombok sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional yang diistilakan dengan 10 Bali Baru. Dari 10 destinasi prioritas ini, diturunkan kembali menjadi 5 destinasi yang disebut sebagai destinasi Super Prioritas. Mandalika termasuk juga di dalamnya. Dengan demikian, pesona pariwisata di Bumi Gora ini nantinya akan semakin memanjakan para wisatawan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mendapatkan kesempatan memaparkan potensi pariwisata NTB di hadapan ratusan peserta Rakornas Pariwisata ke-III tahun 2019. Dalam paparannya dijelaskan, Mandalika yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional saat ini terus bergerak menyelesaikan dan melengkapi berbagai infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya. Terlebih, Mandalika akan menjadi lokasi balap motor paling bergengsi di dunia: MotoGP pada tahun 2021.

"Salah satu infrastruktur yang saat ini terus dikebut pengerjaannya yaitu Sirkuit Mandalika. Hal ini mengingat, sirkuit Mandalika nantinya akan digunakan sebagai lokasi perhelatan MotoGP 2021," jelas Wagub hari ini, Rabu, 11 September 2019 di Ballroom Swiss Hotel PIK Avenue Jakarta. **(BE04)**

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

Jakarta, BimaEkspres.-

Kamis, 5 September 2019, seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan ini mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum, Abdul Manan dalam siaran persnya mengatakan, kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain, soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas, tidak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen. Penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pegawai KPK, kata Manan, jika RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu. Dalam RUU itu juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

Dengan ketentuan ini, kata dia, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK.

Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK.

Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara.

Dua fakta ini sangat merisaukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 AD ART AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah "terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan."

Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.

Mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi.

Mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan korupsi.

Mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR. **(BE04)**

10 Unit Rumah di Desa Ngali Terbakar

Kondisi rumah yang terbakar rata dengan tanah.

Bima, BimaEkspres.-
Musibah kebakaran kembali terjadi ke Kabupetan Bima, kali ini dialami warga di RT 10 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Rabu (11/9) sekitar pukul 10.30 Wita. Sebanyak 10 unit rumah terbakar, diduga akibat arus pendek listrik.

"Ada 10 unit rumah yang terbakar, tiga rumah rata dengan tanah, tiga rumah rusak berat dan empat rumah rusak ringan," jelas Kapolsek Belo, IPDA I Kadek Sumarta, SH.

Berdasarkan data, tiga rumah yang hangus terbakar itu milik Yasin (35). Selain rumah, juga satu unit sepeda motor supra serta isi rumah dan perlengkapan.

Sehingga ditaksirkan kerugian lebih dari Rp150 juta. Rumah milik Sulaiman dan Rufiah juga ditaksirkan diatas Rp150 juta.

Sementara korban kebakaran rusak berat sebanyak tiga unit rumah. Rumah tersebut milik Arina (30), Mulyadin dan Asima, rata-rata mengalami kerugian di atas Rp100 juta, sementara korban rusak ringan adalah Ahati, Durhama, Fauzi dan Idris, kerugian masing-masing di bawah Rp100 juta.

"Berdasarkan keterangan warga sekitar, korban bernama Yasmin melihat api berkobar dan menjalar kerumah warga lain, tiga unit rumah terbakar hangus tidak berhasil diselamatkan, 3 rumah rusak berat dan empat rumah rusak ringan namun dalam musibah kebakaran tidak ada korban jiwa," kata Kadek.

Begitu menerima laporan, Personel Posramil dan Polsek Belo dan Pol PP dibantu oleh warga sekitar berusaha mematikan api dengan alat seadanya.

"Dua mobil Damkar dan satu mobil tangki juga memberikan pertolongan menyemprot api yang masih membakar sehingga api berhasil dipadamkan," katanya. **(BE05)**

Yayasan Al-Muhsinin Kota Bima Donor Darah

Kota Bima, BimaEkspres.-
Yayasan Al-Muhsinin Kota Bima Melaksanakan Kegiatan Donor Darah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Yayasan Al-Muhsinin Kota Bima bekerjasama dengan RSUD Bima dan Palang Merah Indonesia (PMI) Bima menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah di Exs Kantor Bupati Lama, Rabu 11 September 2019.

Kegiatan dibuka Staf Ahli Walikota Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H.M.Farid M.Si. Dihadiri Ketua PMI Bima, dr. Sucipto, Kepala Perangkat Daerah dan berbagai unsur.

Kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Kegiatan donor darah merupakan salah satu program kerja yayasan dengan jumlah pendonor lebih kurang sebanyak 100 orang.

Staf Ahli Walikota Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Drs.H.M.Farid M.Si menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Al-Muhsinin yang menyelenggarakan kegiatan donor darah.

Staf Ahli juga menyampaikan kepada peserta agar bisa mensosialisasikan beberapa program pembangunan yang telah dicapai dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan ekonomi masyarakat.

Beberapa pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini seperti (1) Penyelesaian pembangunan masjid raya Al-Muwahidin Kota Bima dengan bantuan anggaran sebesar Rp10 miliar, Pembangunan masjid kantor walikota, Pengembangan destinasi wisata lawata, Pengembangan ekonomi kreatif melalui hibah bansos. Akreditasi RSUD Asakota dan penunjang kesehatan lainnya. Pembangunan Puskesmas Paruga dan Rasanae Timur. Pembangunan sarana prasaran pasar senggol dan pasar raya Amahami.

Penambahan penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 114 unit. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dua bendungan.

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dengan melakukan pengeboran di tiga titik. Pembangunan dan pemasangan jaringan distribusi air minum pada 5 kelurahan. Pembangunan ipal komunal skala kawasan pada wilayah kelurahan Lelamase.

Pembangunan sarana sanitasi skala individual di 10 kelurahan. Mendapatkan bantuan satu unit kapal dari Kementrian Perhubungan RI. Serta Rehab rumah/Bedah rumah tidak layak huni dibeberapa kelurahan.

Untuk tahun 2020 mendatang Staf Ahli Walikota Bima juga menjelaskan pemerintah daerah mendapatkan beberapa dana bantuan dari Pemerintah Pusat diantaranya Pembangunan gedung perpustakaan Kota Bima lantai 3 dengan anggaran sebesar Rp10 miliar.

Pembangunan destinasi pantai Kolo dengan pembangunan beberapa fasilitas wisata pantai dan wisata bahari berupa pengadaan *glass bottom boat*, pembangunan dermaga wisata, pembuatan gazebo, pembuatan *landscape* dan pembuatan *boardwalk* dengan anggaran lebih kurang sebesar Rp10 miliar dari dana DAK Kota Bima.

Pembangunan drainase dari dana hibah kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 5,5 miliar.

"Kami mengharapkan doa dan dukungan agar pemerintah daerah bisa melaksanakan program-program yang sedang dan akan terlaksana sampai selesai," ujarnya. **(BE04)**

Nyaris... dari hal.1

"Saat mengambil sepeda motor itu pelaku ketahuan massa lalu mengejarnya," katanya seraya menambahkan karena ketakutan ND lari sekitar 5 km menuju Polsek Dompu Kota untuk menyelamatkan diri.

Bahkan beberapa anggota Polsek Kota Dompu sempat kaget melihat pemuda yang dikejar massa dan cepat melakukan pengamanan sambil menenangkan warga.

Pemilik sepeda motor, Khairin, mengaku sepeda motor Supra 125 miliknya dengan warna putih itu dibawa oleh adiknya, Ardian untuk mengembalakan bebek di So Tolo Jero bagian selatan. Saat mengetahui motornya dicuri dari informasi adiknya, langsung mencari di sekitar TKP.

Namun di TKP tidak ada dan akhirnya menemukan sepeda motor miliknya itu dinaiki oleh seseorang di Rabalaju. "Begitu melihat sepeda motornya kendarai orang langsung saya kejar," katanya.

Mengetahui dikejar massa, pelaku tancap gas melajukan kendaraan curianya itu ke arah timur. Namun sampai di Dusun Saka, pelaku sudah dihadang massa. Pelaku berlari dan meninggalkan sepeda motor dicurinya menuju Polsek Dompu Kota.

Pelaku yang memiliki tubuh tinggi itu sempat memasuki kebun jagung milik warga di Lingkungan Jado untuk menyelamatkan diri. Namun massa terus mengejarnya sampai akhirnya tiba Polsek Dompu.

Di kantor Polsek sempat terjadi ketegangan antara massa dengan aparat. Ratusan massa yang mengejar pelaku Curanmor itu ingin menghakimi. Bahkan terjadi lemparan batu ke arah Kantor Polsek Kota Dompu.

Beruntung aparat kepolisian dan dibantu TNI berhasil meredam kemarahan massa. Setelah dipastikan kondisi aman, pelaku dibawa ke Mapolres Dompu untuk proses lebih lanjut.

"Beraninya dia mencuri disiang hari," kata Hawsaf seorang warga lainnya. **(BE03)**

Desak Copot... hal.1

usaha baru pada dinas sosial serta program BPJS untuk masyarakat miskin.

Sementara pada Dinas PU urainya, terkait pembangunan Masjid Agung Bima atau Al Muwahidin Bima dan sejumlah program lain yang erat kaitannya dengan visi misi andalan Lutfi dan Feri.

"Serapan anggaran mereka ini kok lamban? Padahal sudah tersedia semua. Mereka ini juga pernah dipanggil kok, dan ditanyakan kenapa sampai lamban begini," tukasnya diruangannya kemarin.

Jawaban yang didapatkan pihaknya lanjut Syamsurih lantaran lambannya sistem audit, terlebih seperti masalah pembangunan Masjid Agung yang masih menunggu penyerahan atau pelimpahan dari yayasan.

Sebagai lembaga legislatif yang mengontrol roda kepemimpinan eksekutif, pihaknya mendesak Wali Kota Bima agar mencopot kadis-kadis yang dinilai lamban serta menghambat program kerja andalan mereka yang terhitung satu tahun kepemimpinannya.

"Dua dinas ini kebetulan yang banyak terkait visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sekarang. Sementara dinas yang lain tidak terlalu berkait," tutupnya.

Seperti diberitakan Bima Ekspres sebelumnya, Wali Kota Bima mengklaim hingga memasuki usia satu tahun kepemimpinannya, sudah sekitar 80 persen lebih pihaknya merealisasikan program andalan atau visi misi saat mencalonkan diri mereka dalam Pemilukada tahun lalu. Dan dua dinas inilah yang banyak berkaitan erat dengan janji politik mereka. **(BE09)**

Syamsurih, SH

DIJUAL CEPAT

RUMAH 2 LANTAI LOKASI PINGGIR JALAN SAMPING PERTOKOAN RABA, 4 KT, 2 KM, DAPUR, RUANG TAMU, GARASI MOBIL

HUBUNGI: HP 0852 4102 5137

Kominfo Gelar Rakor Persiapan GBIP Tingkat NTB

Kota Bima, BimaEkspres.-
Untuk rangka memaksimalkan persiapan Gembyar Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa/ Kelurahan menuju Benderang Informasi Publik (GBID) tingkat Provinsi NTB, Pemkot Bima melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadiri dapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Informasi (KI) NTB diruang kerja asisten I Setda Kota Bima.

Rakor digelar Selasa (10/9) dipimpin asisten I, Drs H Supartman di hadiri seluruh jajaran KI NTB dan jajaran Kominfo Kota Bima, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris, Drs Ahmadin, MAP kepada Bima-Ekspres di kantornya, mengaku, kegiatan Rakor tersebut dalam rangka kepastian dan sekaligus persiapan pelaksanaan Gembyar Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa/ kelurahan Menuju Benderang informasi publik 2019 akan digelar dimataram pada tanggal 24 September.

Kegiatan Gebyar GBIP ini juga bertujuan dalam rangka penguatan program PPID layanan dasar. Terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk itu gembar GBIP nantinya akan melibatkan seluruh puskemas dan sekolah setingkat SMA/ SMK.

Ini juga kata Ahmadin, sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik. Tambahnya, bahwa kegiatan Gembyar dilaksanakan oleh KI NTB,

Drs Ahmadin, MAP

Rakor ini tujuan bertujuan untuk memastikan keikutsertaan sekolah dan seluruh Puskesmas, desa atau kelurahan , PPID utama kota Bima yaitu Kominfo pada ajang Gembyar dimaksud.

Karena Gembyar ini juga akan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kabupaten/ kota seluruhnya dan diperkirakan ada sebanyak 1500 peserta.

Ditanyakan kesiapan Kota Bima? Diakui Ahmadin, Dari kesiapan kita tentu akan gelar rakor lebih lanjut dengan dua dinas berkaitan dengan keikutsertaan dan persiapan kita akan kita bawa saat Gembyar.

Misalnya nanti ada rencana akan membawa satu grup sanggar pentas seni yang akan di tampilkan di acara Gembyar.

Melalui Pentas seni nanti akan disampaikan pesan dan ungkapkan mengenai bagaimana pelaksanaan informasi publik, seperti digambarkan dalal sebuah cerita dipentas.

Contoh bagaimana pendidikan dan layanan dasar kesehatan kedepannya, Nanti akan ada panggung Gembyar. Selain acara Gembyar kata Ahmadin, Nantinya akan ada juga rangkaian kegiatan lainnya, seperti penganugrahan juara pentas seni akan diberikan penghargaan oleh KIP NTB.

Akan ada juga agenda seminar kaitan dengan KIP akan dipaparkan oleh narasumber tentunya akan menambah pengetahuan dan referensi bagi PPID di daerah. "Untuk memaksimalkan agenda tersebut kita akan koordinasi kembaki dengan OPD punya program layanan dasar dan pendidikan dan kesiapan mereka dalam kegiatan Gembyar," terang Ahmadin. **(BE06)**

Rasanae Barat Juara Umum MTQ Kota Bima

Kota Bima, BimaEkspres.-
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XIV Kota Bima, Rabu (11/9) tadi malam, berakhir dan ditutup oleh Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian, SH di arena MTQ halaman masjid Agung Al Muwahiddin Kota Bima.

Juara umum diraih Kecamatan Rasanae Barat dengan nilai (62) meninggalkan Kecamatan Raba (54), Kecamatan Rasanae Timur (50), Asakota (41), dan Kecanatan Mpunda (29) sebagai juru kunci. Kepastian itu diperoleh setelah Koordinator dewan hakim membacakan surat keputusan dewan hakim MTQ XIV Kota Bima.

Tidak hanya itu, pada MTQ kali ini dua qari dan qariah terbaik pertama cabang tilawah golongan dewasa masing-masing qari dari Kecamatan Raba, Wahyudin, S.Pdi dan qariah duta Kecamatan Mpunda, Rahmawati, S.Pdi, meraih tiket Umrah.

Qari terbaik golongan tartil diraih Muh. Fazrul Falah (Rasanae Barat), disusul Muh Ridho (Raba), dan M Al Fatih (Asakota). Qariah diraih, Irma Yunita (Asakota), disusul Zaskia Devi Annisa (Rasanae Barat). Golongan anak-anak qariah, M Zahran Bahreisy (Rasanae Barat), disusul Muhammad Maulana (Raba), Muh Sahid Mukadas (Asakota). Qariah, Zakiatun Shalihah (Mpunda), Ihram (Asakota), Ismi Rahmadiatin (Raba). Qari terbaik remaja, M Farhan (Rasanae Barat), Dimas Hendrawan (Asakota), Miftahul Huda (Asakota). Qariah, Fatimah (Raba), Salfa Angelina (Rasanae Barat), Egalita Ratnasari (Asakota). Qari terbaik golongan dewasa, Wahyudin (Raba), Muhlis (Asakota), Syarifuddin (Mpunda). Qariah, Hj Rahmawati (Mpunda), Nining Kurniati (Asakota), dan Sri Yuliati (Raba).

Juara pertama ada yang Rp3,5 juta hingga Rp5 juta Kecuali juara pertama golongan dewasa meraih hadiah umrah. masing-masing sebesar 30 juta. Cabang lain adalah Tahfidz, Fahmil, Syarhil, Hattil Quran, dan cabang Qiraat. **(BE02)**

NTB Tandatangani LoI dengan Malaysia

Mataram, BimaEkspres.-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menandatangani *Letter of Intent* (LoI) perjanjian kerjasama dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Rabu (11/9/2019), sebagai lanjutan pertemuan sebelumnya.

Dewan Perdagangan Islam Malaysia melaksanakan perjanjian kerjasama ini usai melakukan survei di beberapa tempat strategis di NTB ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama ini adalah awal untuk saling kenal antara NTB dengan Malaysia.

"Tidak mungkin kita saling membantu jika kita tidak saling memahami. Tidak mungkin kita saling memahami jika tidak saling mengenal, dan saya kira ini adalah upaya awal untuk saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu, kita akan saling memahami untuk kemudian kita saling membantu satu sama lain," ungkap Gubernur.

Gubernur mengatakan, banyak sekali aktivitas bisnis di NTB yang dapat dikembangkan. Pemerintah NTB sangat terbuka untuk menjalin kerjasama. Ia mengucapkan terimakasih kepada Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, de-

ngan kerjasama ini, banyak perubahan yang akan terjadi di NTB.

"Dengan adanya kerjasama ini, tentu akan banyak juga penerbangan dari Malaysia ke NTB dan sebaliknya. Kami berharap hal itu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari Malaysia ke NTB ini," ujarnya.

Gubernur meminta kepada semua pihak untuk membantu dan memfasilitasi para investor yang ingin mengembangkan bisnisnya di NTB. Gubernur juga berharap, dengan adanya kerjasama ini dapat pula meningkatkan angka kunjungan wisata dari Malaysia.

Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Datuk Sahar, menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur NTB dengan pelayanan dan kesungguhan NTB untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia.

"Kami berterimakasih kepada bapak Gubernur dan pimpinan lainnya. Banyak hasil dari pembicaraan dan diskusi yang kita laksanakan beberapa hari ini. Investor-investor yang kami bawa ke sini adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar," terangnya.

Perlu diketahui, penandatanganan pembentukan kerjasama ini terdiri dari bidang pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan dan pariwisata.**(BE08)**

Pelanggaran... dari hal.1

H Jakaria. Juga belasan perwakilan warga Kelurahan Dara.

Dari sejumlah OPD yang diundang, Dinas PUPR, Bapedda, Perkim dan Perijinan Terpadu dimintai penjelasannya soal adanya pelanggaran Perda RTRW. Mereka mengaku baru menjabat dan belum paham soal adanya pelanggaran tata ruang di kawasan Ama Hami.

Jawaban itu membuat Ketua Pansus, H Armansyah berang. Seharusnya pejabat yang hadir memahami persoalan yang ada, meski baru menjabat.

Pertama, kata dia, kewenangan atas laut itu sesuai perundangan-undangan adalah Pemerintah Provinsi NTB dan pusat. Namun untuk kepentingan segelintir kelompok orang, Pemkot telah menyerobot hak dan kewenangan Pemprov NTB.

"Pemkot Bima selama ini telah sengaja dan sadar sudah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dengan sengaja merubah pemanfaatan kawasan Ama Hami. Dalam Perda RTRW Provinsi NTB hanya dimanfaatkan untuk tiga kegiatan, yaitu Pariwisata, perikanan dan budidaya," ujarnya.

Padahal pemahaman atas Perda RTRW harus sinkron mulai dari pusat sampai daerah. Malah kini pemanfaat kawasan Ama Hami diubah untuk ruang perdagangan dan pergudangan.

"Ini diubah hanya dengan asumsi dan analisa para pejabat Pemkot Bima tanpa mengkoordinasikan dengan provinsi atas Perda RTRW ada," ujarnya.

Setelah sengaja melanggar atas Perda RTRW, Pemkot mengubahnya untuk perdagangan maupun pergudangan tanpa dilengkapi dengan dokumen rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Padahal dokumen RDTRK penting untuk memastikan apakah pemanfaatannya sudah sesuai tata ruang atau tidak.

"Jelas ini adalah pelanggaran dan pembiaran disengaja oleh Pemkot Bima selama ini. Sementara di kawasan Ama Hami saat ini sudah terbangun sejumlah ruko sampai di Padolo tiga banyak terbangun pergudangan," bebernya.

Anggota Pansus Ama Hami, Taufik AK, mengatakan, banyak problem muncul, termasuk masih misterinya lahan ruko di bagian timur pasar. Sebelumnya diduga termasuk milik Pemkot Bima.

Rapat Pansus akan dilanjutkan Kamis (12/9) dengan agenda pemanggilan seluruh oknum pemilik lahan di atas laut Ama Hami untuk mengkonfirmasi legalitasnya. **(BE06)**

Atap Masjid Nurul Yaqin Karampi Mulai Runtuh

Bima, BimaEkspres.-

Diduga termakan usia, konstruksi bagian atap Masjid Nurul Yaqin, di Dusun Mamba Na'e Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, berjatuhan dilantai, Selasa (10/9) sekitar pukul 13.20 Wita. Beruntung kejadian tersebut setelah jamaah selesai melaksanakan salat Dzuhur.

Warga Karampi, Munadjir, menceritakan kejadian terjatuhnya puing bangunan bagian atap masjid.

Sejumlah warga sekitar kaget, lantaran bangunan yang sudah tua puluhan tahun lalu tiba-tiba rusak dan terjatuh.

"Kami kaget melihat bagian atap masjid berjatuhan, beruntung tidak menimpa kami saat salat Dzuhur, kejadiannya setelah salat Dzuhur berjamaah," katanya, Rabu (11/9).

Dia mengaku, selama dibangun tidak pernah diperbaiki. Pihaknya sangat kuatir tempat ibadah ini memakan korban jiwa saat melaksanakan ibadah.

"Bagian atap dan dinding masjid sudah hampir lima tahun terakhir retak karena termakan usia, kondisi ini menguatirkan jama'ah untuk datang beribadah," katanya.

Dia mengaku, Dana Desa hanya dianggarkan untuk perbaikan ringan saja. Tidak ada dana untuk renovasi secara total untuk memperbaiki kerusakan.

"Kami berharap pemerintah desa dan Daerah bisa memperhatikan tempat ibadah ini jika dibiarkan begini takutnya ada korban," jelasnya.

Kondisi reruntuhan bangunan masjid Nurul Yaqun Karanmpi.

Dia mengaku, untuk saat ini Masjid tetap dijadikan tempat ibadah salat berjamaah setiap waktu, namun sangat dikhawatirkan akan ambruk semua bagian atap. **(BE05)**

Penetapan Nama Calon Kades Talabiu Digugat Warga

Bima, BimaEkspres.-

Sejumlah warga Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, melakukan protes di Kantor Desa setempat, Rabu (11/9). Mereka menuntut panitia Pilkades untuk transparan dan terbuka dalam penetapan nama Calon Kepala Desa yang lulus. Mereka menduga ada indikasi penyimpangan dalam penepatan.

"Aksi spontan sejumlah masyarakat ini, meminta transparansi panitia dalam penetapan nama Calon Kades yang lolos, sebab tidak ada sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat," jelas salah seorang warga, Arif Munandar.

Kata dia, sejumlah warga mendatangi Kantor Desa, meminta panitia berikan penjelasan terkait penetapan nama calon kelapa Desa. Sebab tidak ada informasi yang diterima masyarakat terkait penetapan dari sejumlah bakal calon yang ada.

Suasana protes yang dilakukan oleh warga Talabiu.

"Penetapan nama calon Kades tidak ada yang mengetahui oleh masyarakat, makanya kami pertanyakan seperti apa penilaian dan panitia wajib memberikan penjelasan seperti apa prosesnya," katanya.

Saat sejumlah masyarakat hadir di Kantor Desa, tidak ada satupun panitia Pilkades menerima mereka.

Situasi pun memanas, Plt Kades, Camat dan Kapolsek Woha hadir di lokasi untuk memberikan pencerahan.

Ketua Panitia, Yusuf Hasan dan anggotanya dinilai tidak ada niat baik memberikan penjelasan terkait penetapan nama calon Kepala Desa. Masyarakat tetap akan menuntut panitia untuk mengklarifikasi.

Bakal calon kepala Desa berjumlah 7 orang diantaranya Mustimin Ikraman, Nasruddin h. Mahmud, Suryadin, S. Pd, Ahmad dan Ahmad H. Usman, M Jafar Ibrahim dan Gunawan M. Amin.

"Dua nama tidak ditetapkan lulus menjadi calon antaranya mantan Kades M Jafar Ibrahim dan Gunawan M. Amin, kami pertanyakan seperti apa proses penilaian sehingga tidak diluluskan," kata Arif.

Camat Woha Irfan Dj, SH, saat mencoba menenangkan masyarakat di Kantor Desa, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi ke Pemdes terlait keputusan panitia dalam menetapkan nama.

"Saya minta masyarakat masalah ini akan dikoordinasikan ke Pemdes, namum ditolak, sehingga kami tidak bisa berbuat apa untuk memutuskan," katanya.

Irfan juga mengaku, pihaknya belum mengetahui seperti apa proses penilaian sehingga panitia tidak meluluskan dua orang bakal calon.

"Kami minta masyarakat untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain," ujarnya.

Pantauan BimaEkspres, sejumlah masa membakar ban bekas di halaman kantor desa. Bahkan ada beberapa yang melempar kaca menggunakan batu. **(BE05)**

Tim Percepatan Pencegahan Stunting Berkunjung di Bima

Bima, BimaEkspres.-

Tim percepatan pencegahan stunting dari Sekretariat Wakil Presiden dan World Bank berkunjung di Kabupaten Bima, Senin (10/9). Kehadiran mereka tersebut menindaklanjuti komitmen dan keterlibatan bersama dalam rangka percepatan pencegahan stunting ini.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs H Muzakkir, MSc dalam arahannya mengatakan penanganan stunting memerlukan intervensi dan tindakan nyata program pemerintah baik dari pusat sampai daerah dalam penanganan stunting.

"Pertemuan ini difokuskan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Bima, akselerasi program dan kebijakannya," ujar Muzakkir.

Hal senada disampaikan Sekretariat Wakil Presiden RI, Drs H Edi Suryana MM menyampaikan bahwa terkait persoalan stunting ini merupakan program nasional terkait percepatan pencegahannya. Sebab secara nasional stunting ini masih diatas angka 30 persen.

"Angka tersebut meski dinilai sudah ada penurunannya. Namun itu harus terus digenjot agar angka stunting turun," tegasnya.

Oleh karenanya, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Stunting tahun 2019 – 2024 yang akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga tingkat Pemerintah Desa.

Tim Pencegahan Stunting saat diterima Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan, MPd.

"Penanganan stunting melibatkan 23 Kementerian dan Lembaga Pemerintah, namun belum bersinergi dan selaras. Untuk kepentingan percepatan penanganan inilah sehingga langsung dikoordinasikan langsung oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui pola pendampingan langsung hingga tingkat desa" jelas Edy Suryana.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni ST MT MSc yang mendampingi Tim menyampaikan bahwa berdasarkan agenda kegiatan Tim dan World Bank beserta seluruh komponen pemerintah daerah dibawah koordinasi Bappeda selanjutnya melakukan kunjungan lapangan. Yakni di Kecamatan Sape, Bolo dan Madapangga dengan sasaran kunjungannya di Puskesmas dan Posyandu.

"Hasil yang ingin dicapai antara lain perubahan perilaku dan tingkat capaian percepatan penanganan stunting secara langsung di daerah ini," pungkasnya. **(BE07)**